

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyadi, T. (2008). Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia <http://dppka.jogjaprovo.go.id/upload/files/artiakuntabilitas.pdf> (Diakses pada 15 April 2019).
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Prenada Media.
- Darmawan, D. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pedoman Akuntansi, Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal FE UNP Artikel Ilmiah* .
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto. (2008). *Pedoman Survei Kuesioner, Mengembangkan Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Keputusan Badan Kepegawaian Negeri No. 46 A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan pelayanan Publik.
- Kirana, C. (2018). Pengaruh Tata Kelola Keuangan Desa Terhadap AKuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Vo.6 Edisi 12, Mar 2018* , 205-211.
- Krina. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional <http://www.scribd.com/document/25943916/Indikator-Dan-Alat-Ukur-ATP> (Diakses tanggal 15 April 2019).

- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2000). Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah.
- Mada, S. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *FEB Universitas Sam Ratulangi* .
- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No.1, Mei 2006.
- Nova, W. S. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan, dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal FE UNP Artikel Ilmiah* .
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan, Dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No.8. Tahun 2006. *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- PPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Perdana, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. *Jurnal FEB UMY* .
- Putra, A. S. (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia atau Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan PEmerintah Kabupaten Bangli.

- Sapartiningsih, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi FE Universitas Slamet Riyadi Surakarta* , 100-114.
- Septiana, L. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal FE UNP Artikel Ilmiah* .
- Soekidjan. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Agsara.
- Sopiah. (2008). Komitmen Organisasi. *Jurnal* .
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: PB.
- Sukmaningtyas, S. (2017). Pengarus Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi* .
- Supomo, N. I. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (n.d.).
- Wati, E. (2010). Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah. *SNA XIII FEB Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto* .
- Widyatama, A. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia STIE Panca Bhakti Palu* , 1-20.
- Yesinia, N. I. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aset Prodi Akuntansi FPEP UPI* , 105-112.